



Jeda Kemanusiaan di Gurun Pasir

Jeda kemanusiaan Papua tak kunjung berjalan. Komnas HAM belum menindaklanjuti, pemerintah tak membentuk tim pelaksana.

BELUM sebulan ditandatangani di Jenewa, Swiss, isu jeda kemanusiaan Papua juga dibahas dalam sidang darurat umum militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pada 29 November-1 Desember 2022. Hari-hari itu para pentolan dan anggota sayap militer Organisasi Papua Merdeka tersebut berkumpul di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Digelar di Markas Komando Daerah XV Ngalum Kupel, persamuhan itu juga membahas perkembangan satu tahun terakhir. Menginjak persoalan jeda kemanusiaan, personel TPNPB ramai-ramai bersuara negatif. "Kami menolak karena tak melibatkan pihak yang berkonflik," kata juru bicara TPNPB, Seby Sambom, saat dihubungi pada Jumat, 11 November 2022.

Jeda kemanusiaan Papua ditandatangani pada 11 November 2022. Tiga poin penting dalam nota kesepahaman itu ada-

lah menghentikan konflik di Papua, membantu pengungsi, dan menangani tahanan. Pihak yang menandatangani perjanjian tersebut antara lain pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Menurut Seby, TPNPB sama sekali tak pernah diajak bicara sebelum dan sesudah penandatanganan jeda kemanusiaan Papua. TPNPB menganggap ULMWP dan MRP yang menekan perjanjian itu tak mewakili semua kelompok di Papua. Seby menyebutkan organisasinya telah memberikan peringatan kepada gereja yang ikut menjalankan jeda kemanusiaan Papua.

Seby mengklaim rapat itu dihadiri ribuan personel TPNPB. Rapat yang dipimpin oleh Kepala Staf Umum TPNPB Terryanus Satto itu juga membahas persoalan lain, seperti penambahan empat provinsi yang dianggap mengancam orang asli Pa-

—
Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Yoel Luiz Mulait (kedua dari kanan) dan Ahmad Taufan Damanik di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 11 Maret 2022.

pua. Menurut Seby, TPNPB di berbagai wilayah menyuarakan penolakan terhadap jeda kemanusiaan Papua.

Dilansir dari *Jubi.id*, Derek Daud Nawipa, pemimpin TPNPB Markas Emas Topo di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, dan Jonathan M. Pigai, Komandan Daerah Pertahanan IX Kabupaten Dogiyai, juga menyatakan penolakan terhadap jeda kemanusiaan Papua. "Kami tak mempercayai jeda kemanusiaan Papua," ujar Jonathan.

Yorrys Raweyai, anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Papua, menilai jeda kemanusiaan sulit berjalan tanpa keterlibatan berbagai kelompok di wilayah tersebut. Ia mengaku pernah berdiskusi dengan sejumlah kelompok asal Papua yang mempertanyakan jeda kemanusiaan. "Yang membahas segelintir. Ada lebih dari 50 kelompok di sana," ucapnya, Kamis, 29 Desember 2022.

Mengapresiasi upaya Komnas HAM meredam konflik di Papua, Yorrys mengata-



—
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigirospeaking di kantor Komnas HAM, Jakarta, 14 November 2022.

kan jeda kemanusiaan sebenarnya bukan barang baru. Sejak zaman Presiden Soeharto, ada berbagai upaya menyelesaikan konflik di Papua. Hingga Soeharto lengser dan digantikan oleh B.J. Habibie, upaya itu gagal. Sebab, sebagian rakyat Papua telah bertekad merdeka dan lepas dari Indonesia.

Sebaliknya, Ketua Komnas HAM periode 2017-2022 yang menandatangani jeda kemanusiaan Papua, Ahmad Taufan Damanik, tetap optimistis perjanjian tersebut bisa berjalan. Ia yakin organisasi asal Papua yang menekan nota kesepahaman itu akan bekerja maksimal. Misalnya mensosialisasi isi perjanjian ke berbagai kelompok lain.

Taufan bercerita, dalam pertemuan 11 November di Jenewa, perwakilan Papua menginginkan Kabupaten Intan Jaya bisa menjadi lokasi pelaksanaan jeda kemanusiaan. Seorang peserta rapat mengatakan perwakilan Papua ingin melihat keseriusan pemerintah menangani pengungsi karena di Intan Jaya terdapat banyak pasukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI serta ada cadangan emas Blok Wabu.

Pertemuan itu sempat diskors. Belakangan, Kabupaten Maybrat yang dipilih karena pertimbangan keamanan. "Kalau sukses di satu tempat, bisa berulang di daerah lain," ujar Taufan saat dihubungi, Kamis, 29 Desember 2022.

Belum juga jeda kemanusiaan Papua berjalan, konflik kembali membara di Maybrat. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Seby Sambom, mengatakan gangguan terhadap jeda kemanusiaan memang telah direncanakan dalam pertemuan di Kiwirok pada akhir

November, yaitu menguasai Kumurkek, pusat pemerintahan Maybrat, sebelum perayaan Natal.

Seby mengklaim pasukan milisi telah menguasai Kumurkek sejak Sabtu, 24 Desember 2022. "Pasukan kami masih ada dan kapan saja siap beraksi," katanya. Namun Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Inspektur Jenderal Daniel T. Monang Sinaga menuding informasi tersebut palsu. "Itu rekayasa. Anak buah saya masih berada di sana," tuturnya.

—
—
—
LIMA jam setelah jeda kemanusiaan Papua ditandatangani di Jenewa pada pukul 9 pagi waktu Indonesia, kepengurusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dipimpin Ahmad Taufan Damanik berakhir. Tiga komisioner yang getol mengawal isu Papua, yaitu Taufan, Beka Ulung Hapsara, dan Mohammad Choirul Anam, tak lagi menjadi pengurus.

Kepada *Tempo* pada Jumat, 30 Desember 2022, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigirospeaking mengatakan komisioner anyar baru mendapat dokumen nota kesepahaman jeda kemanusiaan Papua pada 23 November. Mereka pun belum mendapat penjelasan dari komisioner lawas tentang pelaksanaan jeda kemanusiaan yang berlangsung mulai Desember 2022 hingga Februari 2023.

Pengurus baru Komnas HAM berha-

ti-hati menyikapi jeda kemanusiaan. Salah satunya mengenai lokasi pelaksanaan. Komnas HAM menilai jeda kemanusiaan hanya berlaku untuk menangani persoalan di Maybrat. Jika jeda kemanusiaan diterapkan di seluruh Papua, waktu yang dibutuhkan bakal lebih lama. "Konsepnya tak semudah itu dijalankan," ujar Atnike.

Jeda kemanusiaan Papua juga dinilai melampaui kewenangan Komnas HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menugasi Komnas HAM memantau, memediasi, dan memberi rekomendasi dalam persoalan HAM. "Fungsi Komnas HAM memediasi, tapi dalam jeda kemanusiaan justru Komnas dimediasi," ucap Atnike.

Hingga pekan lalu, Komnas HAM belum membicarakan pelaksanaan jeda kemanusiaan Papua dengan pemerintah. Pada Jumat, 16 Desember 2022, Komnas HAM telah bertemu dengan sejumlah pihak dari Papua dalam rapat internal di Hotel Gran Melia, Jakarta. Salah satu kesepakatan mereka adalah menyegerakan pencegahan konflik dan penanganan pengungsi.

Ketua Komnas HAM periode 2017-2022, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan perwakilan Papua telah selesai membentuk tim untuk menindaklanjuti nota kesepahaman jeda kemanusiaan. Ia berharap pemerintah bisa segera membentuk tim yang sama supaya jeda kemanusiaan bisa segera berjalan.

Namun Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. menyatakan pemerintah belum akan membentuk tim pengarah atau pelaksana jeda kemanusiaan. Ia menilai jeda kemanusiaan bukan perundingan antara pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka.

"Itu pembicaraan Komnas HAM dan perwakilan yang mengklaim sebagai wakil rakyat Papua," katanya melalui pesan WhatsApp kepada *Tempo* pada Sabtu, 31 Desember 2022. Mahfud mengatakan pemerintah mendukung upaya Komnas HAM untuk berdialog. Hasil nota kesepahaman di Jenewa pun menjadi masukan bagi pemerintah.

Mahfud mengklaim pemerintah berupaya melaksanakan jeda kemanusiaan Papua. Namun arah angin berubah karena setelah nota kesepahaman itu ditandatangani terjadi delapan kali konflik di Papua, yang mengakibatkan sembilan personel keamanan dan warga sipil tewas.

—
—
—
HUSSEIN ABRI DONGORAN, RAYMUNDUS RIKANG